



Harapan Sektor Wisata Kembali Bergeliat

■ PHRI DIY: Kebijakan Penggunaan Hotel Harus Disertai Pelonggaran Anggaran

Jangan berlebihan dan gunakan hotel terdekat. Karena biasanya terus dimanfaatkan rapat di hotel luar kota agar ada perjalanan dinas, ini yang membuat boros.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah kota dan kabupaten di DIY menanggapi positif pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perihal izin bagi pemerintah daerah menggelar pertemuan atau rapat di hotel. Kebijakan tersebut dinilai akan menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan perhotelan di DIY.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menilai ekonomi di sektor pariwisata dan perhotelan Yogyakarta diprediksi akan kembali hidup. "Bagus, menurut saya yang penting penting tidak boros," kata Hasto, saat dihubungi Senin (9/6).

Kendati demikian, Wali Kota Yogyakarta itu menegaskan organisasi pemerintah daerah (OPD) di Pemkot Yogyakarta wajib menggunakan hotel terdekat. Hal ini agar tidak terjadi pemborosan.

● ke halaman 11

BOLEH GELAR PERTEMUAN

Pemerintah kota dan kabupaten di DIY menanggapi positif izin untuk menggelar pertemuan atau rapat di hotel.

Kebijakan tersebut dinilai akan menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan perhotelan di DIY.

Mendagri tetap ingatkan untuk tidak berlebihan meski ada pelonggaran. PHRI DIY mengingatkan, tanpa pelonggaran anggaran, kebijakan ini hanya akan jadi formalitas belaka.

PHRI DIY menilai, dukungan fiskal yang konkret jauh lebih penting daripada sekadar pelonggaran administratif.



S. aman 11

Harapan Sektor

• Sambutan Hal 1

an anggaran dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

"Jangan berlebihan dan gunakan hotel terdekat. Karena biasanya terus dimanfaatkan rapat di hotel luar kota agar ada perjalanan dinasnya, ini yang membuat boros," ujarnya.

Setali tiga uang, Pemkab Sleman menyambut baik kebijakan Mendagri. Kebijakan tersebut disebut dapat kembali menggeliatkan industri hotel di Bumi Sembada.

"Ya saya senang dengan kebijakan itu. Karena itu dapat menumbuhkan ekonomi di bawah, karena jika ada kegiatan di hotel maka ada stok barang dari bawah dikirimkan ke hotel. Sehingga (ekonomi) hidup. Amat senang saya," kata Bupati Sleman Harda Kiswara, Senin (9/6).

Harda berharap dengan adanya izin rapat di hotel dapat berdampak baik bagi industri hotel dan restoran di Kabupaten Sleman. Jika sebelumnya ada pengurangan karyawan maka diharapkan dapat menyerap kembali karyawan lagi.

Walau demikian, Harda juga mengingatkan kepada jajarannya di Pemkab Sleman agar tetap menyiapkan kebijakan tersebut dengan bijak. Artinya, kata dia, tidak semua rapat Pemerintah Kabupaten harus diselenggarakan di hotel.

Hanya kegiatan tertentu saja, terutama untuk menghormati tamu dan kegiatan yang tidak memungkinkan digelar di kabupaten saja yang diperbolehkan diselenggarakan di hotel. "Intinya jangan main-main dengan anggaran. Itu saya ingatkan," kata dia.

Serupa juga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid. Menurut dia, diperbolehkannya rapat di hotel menjadi angin segar bagi industri hotel di Kabupaten Sleman. Sebab, dengan izin tersebut, ada banyak lembaga atau Kementerian yang nantinya menggelar rapat di hotel.

"Dengan demikian industri MICE (*Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions*) akan kembali menggeliat," ujar dia.

Tidak berlebihan

Perlu diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan, pemerintah daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran asal tidak berlebihan. Hal tersebut dikatakan Tito saat menghadiri acara Musrenbang provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Rabu (4/6).

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran," kata Tito, Rabu (4/6).

Tito mengatakan, pemerintah melakukan efisiensi untuk kepentingan rakyat, tetapi tidak berarti dilarang untuk kegiatan di hotel dan restoran. "Silakan asal jangan berlebihan," kata Tito.

Tito mengatakan, penda harus selektif memilih hotel-hotel yang mengalami penurunan okupansi untuk melaksanakan kegiatan di sana. "Kurang boleh tapi jangan sama sekali enggak ada, tetap lakukan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang agak kolaps-kolaps buatlah kegiatan di sana, supaya mereka bisa hidup," kata Tito.

Terkait hal ini, Tito mengatakan, sudah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan, pemotongan anggaran di daerah untuk penghematan sekitar Rp50 triliun bagi 552 daerah.

Menurut Tito, polongan ini tidak terlalu signifikan dan tidak mengganggu program lain di daerah. "Jadi daerah biarkan saja pendapat saya, untuk ke hotel restoran perjalanan dinas fine. Tapi tolong juga pakai perasaan kalau seandainya rapatnya 3 kali cukup, 4 kali cukup, jangan dibikin 10 kali lah gitu aja. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh saja tegaskan disini," kata Tito.

Jangan formiditas belaka

Pelonggaran aturan yang mengizinkan pemerintah daerah kembali menggelar rapat dan kegiatan dinas di hotel atau restoran disambut positif oleh pelaku industri perhotelan. Namun di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), euforia itu belum sepenuhnya terasa.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengingatkan, tanpa pelonggaran anggaran,

kebijakan ini hanya akan jadi formalitas belaka.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo, menyatakan bahwa lampu hijau dari pemerintah pusat akan sia-sia jika tidak disertai dengan realokasi atau pembukuan kembali anggaran kegiatan dinas di daerah. Sebab, aturan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 125 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah masih berlaku ketat.

"Kalau Pemda boleh (rapat di hotel) tapi tak punya anggaran, ya sama saja bohong," ujarnya.

Menurut Deddy, saat ini reservasi dari instansi pemerintahan masih sangat minim. Kalaupun ada, kemungkinan besar menggunakan sisa anggaran tahun lalu yang belum terkenai pemangkasan. Ia menilai, dukungan fiskal yang konkret jauh lebih penting daripada sekadar pelonggaran administratif.

Kondisi ini turut berdampak pada tingkat okupansi hotel yang masih jauh dari ideal, bahkan di tengah libur panjang Iduladha. PHRI DIY mencatat, tingkat keterisian kamar hotel hanya berkisar antara 20-40 persen. Ini jauh lebih rendah dibandingkan libur Idul Fitri sebelumnya yang sempat mencapai 75 persen.

Deddy menyebut keberadaan *homestay* dan vila yang lebih murah sebagai salah satu penyebab rendahnya okupansi hotel. Selain itu, properti-properti non-hotel ini kerap tidak dibebani regulasi ketat seperti pajak atau izin usaha yang dikenakan pada hotel berbintang.

Kondisi ini, lanjut Deddy, tidak hanya memukul sektor hotel dan restoran, tetapi juga berdampak pada rantai pasok ekonomi yang lebih luas. Mulai dari tenaga kerja, supplier bahan makanan, hingga UMKM lokal turut terdampak akibat terbatasnya aktivitas di sektor perhotelan.

Okupansi rendah

Hingga saat ini okupansi MICE di hotel masih di bawah 10 persen. Meski sedikit menggeliat karena pembukaan blokir anggaran dari Kementerian Keuangan, namun masih jauh dari merata okupansi saat tidak ada efisiensi anggaran. "Sudah ada MICE tapi ya masih di bawah 10

persen. Sangat jauh jika dibandingkan sebelumnya, bisa mencapai 40-60 persen untuk MICE," terangnya.

Dampaknya, tesunya MICE pun memaksa perhotelan di DIY melakukan efisiensi dengan merumahkan karyawan, terutama yang menanganai MICE. Efisiensi tidak hanya menyasar tenaga kerja, tetapi juga biaya operasional yang lain, seperti listrik.

PHRI Kabupaten Bantul menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang mengizinkan pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menggelar rapat di hotel. "Tentunya itu yang kami harapkan seperti prediksi yang memang kami lihat saat awal zaman Pak Jokowi sempat melarang berkegiatan di hotel terus akhirnya diperbolehkan. Tapi, bedanya saat ini kami tidak ada pemangkasan anggaran, kalau tahun ini kami ada pemangkasan anggaran," kata Ketua PHRI Bantul, Yohanes Hendra.

"Nah, dengan kebijakan dari Kemendagri2 nanti juga tergantung dari dinas. Kalau nanti dinas bisa berpikir kebijakan pemerintah pusat itu bisa memperbaiki kondisi perekonomian di kabupaten/kota, tentunya ini bisa menjadi salah satu titik balik menghidupkan dunia perhotelan, salah satunya dengan memanggil kembali karyawan-karyawan yang terkena PHK dan sejenisnya," papar Hendra.

Dengan demikian, kebijakan satu dengan kebijakan lainnya diharapkan dapat berjalan searah dan tidak menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Sebab, sudah hampir setengah tahun, kondisi perekonomian tidak berjalan baik dan dinilai jauh lebih parah dibandingkan pandemi Covid-19 pada beberapa tahun yang lalu.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kulon Progo, Sumantoyo, merespons positif keputusan tersebut. Menurutnya, sudah seharusnya kebijakan tersebut dibuat.

"Segera saja anggaran untuk kegiatan tersebut dikeluarkan dan dibelanjakan, jangan ditahan-tahan," katanya. (bda/han/aka/maw/rif/alz/kpe)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005